

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA  
MULYOREJO TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR I**

**SURABAYA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.01/2014 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Kode Laporan Rutin di Direktorat Jenderal Pajak, serta Nota Dinas Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban serta bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisa kinerja pada tahun 2024. Adapun keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan akan menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dan transparansi atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, serta digunakan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo untuk meningkatkan kinerjanya.

Surabaya, 30 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

Emri Mora Singarimbun



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, penerimaan pajak digunakan untuk menunjang jalannya roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan. Untuk itu target penerimaan pajak yang diemban Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Perbaikan citra Direktorat Jenderal Pajak juga harus diwujudkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun tujuan utama KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah menjaga citra Direktorat Jenderal Pajak dan mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan oleh negara.

Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo adalah Rp1.511.526.045.000,-. Adapun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.513.487.379.176,- atau penerimaan tercapai sebesar 100,13%. Jumlah penerimaan pajak tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,81% dibandingkan jumlah penerimaan pajak tahun 2023.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C.    Sistematika Laporan .....	4
BAB II .....	5
PERENCANAAN KINERJA .....	5
A.    Rencana Strategis.....	5
B.    Penetapan Target Kinerja .....	7
BAB III .....	10
AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A.    Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B.    Realisasi Anggaran.....	55
C.    Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	56
D.    Kinerja Lain-lain.....	56
E.    Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	57
BAB IV.....	58
PENUTUP .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

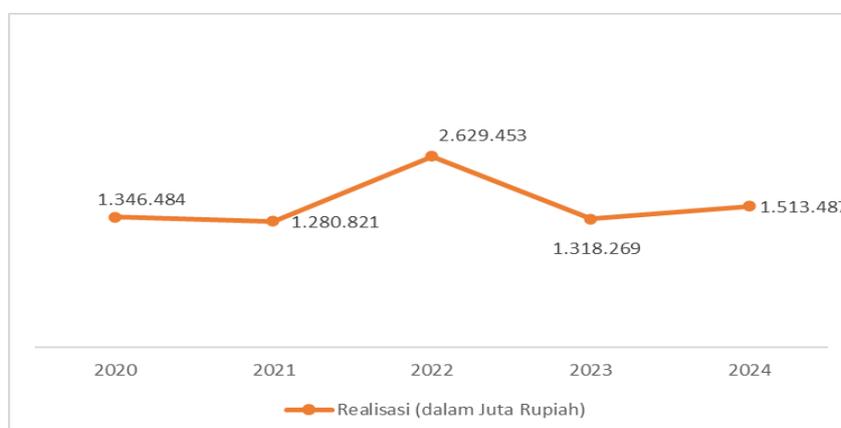
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) *Two* dan *UPK-Three* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta untuk menyusun LAKIN Tahun 2024.

Pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar dan merupakan komponen pendapatan negara yang terdapat di dalam APBN. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Adapun peran strategis KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah sebagai ujung tombak pelayanan dan penerimaan pajak guna mencapai target penerimaan pajak secara nasional.

Pada tahun 2024 target penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jatim I adalah Rp1.511.526.045.000,-. Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2023 yaitu Rp1.273.965.602.000,-, target pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,65%.

Pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.513.487.379.176,- atau 100,13%. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,81% dari realisasi tahun 2023 yaitu Rp1.318.268.983.987,-. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar. Realisasi Penerimaan Pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir



Sumber : Olahan Data Apportal DJP

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

### 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

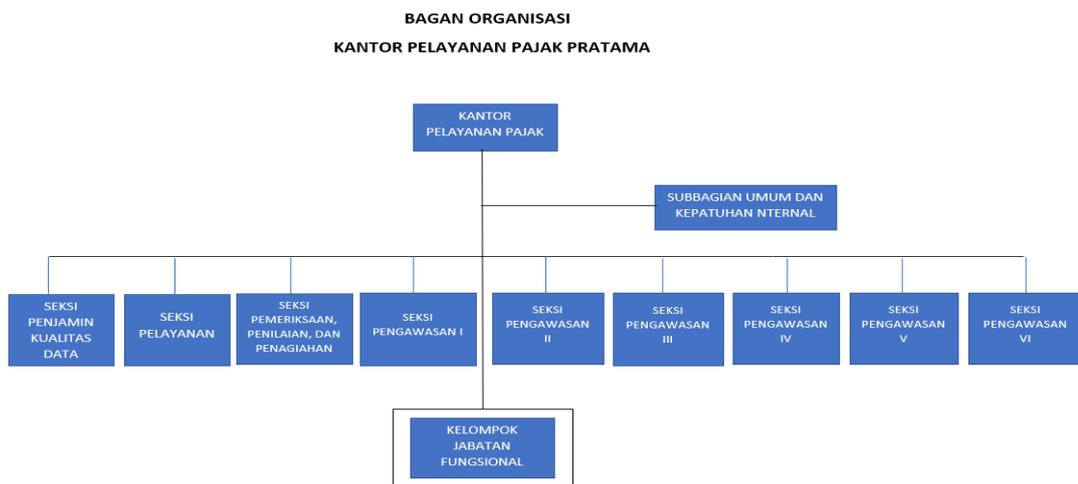
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 diatas, susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar. Bagan Organisasi KPP

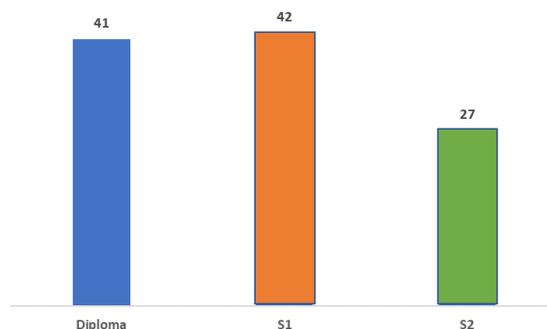
## 2. Sumber Daya Manusia

Kondisi pada awal Tahun 2024, jumlah pegawai pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebanyak 110 orang dengan komposisi jenis kelamin 58% pria yaitu 64 orang dan 42% wanita yaitu 46 orang. Pada jenis jabatan struktural komposisi pria dan wanita hampir sama. Sedangkan pada jenis jabatan fungsional, sebagian besar merupakan pegawai pria.

Tabel. Jumlah dan Komposisi Jenis Kelamin Pegawai per Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
<b>Struktural</b>	48	41	<b>89</b>
<b>Fungsional</b>	16	5	<b>21</b>
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>110</b>

Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Pegawai KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, pada kondisi awal Tahun 2024 merupakan diploma dan S1 dengan jumlah yang hampir sama sedangkan yang lain merupakan lulusan S2 sebanyak 27 orang.



Gambar. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

### C. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun berdasarkan arahan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini terdiri dari beberapa bab yang menguraikan berbagai aspek terkait kinerja organisasi.

Pada Bab I, disajikan latar belakang, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, yang menjadi dasar penyusunan laporan ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika laporan secara keseluruhan. Bab II mengulas perencanaan kinerja dan penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024, yang menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab III membahas akuntabilitas kinerja, yang mencakup penjelasan dan analisis terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari aplikasi kinerja monitoring dan evaluasi oleh DJP, yaitu Dashboard Mandor dan Appportal. Pada bagian Penutup, disajikan kesimpulan umum mengenai capaian kinerja organisasi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2025.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program instansi, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Hasil dari perencanaan strategis adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra digunakan sebagai panduan yang terukur bagi organisasi untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024.

##### 1. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi yang ingin diwujudkan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sesuai dengan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

##### 2. Misi

Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Berikut Misi Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

(Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020)

### 3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang hendak dicapai sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga tax ratio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin baik. Tax Ratio juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dalam proses pemungutan pajak. Pada akhirnya sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo adalah tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024.

### 4. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Adapun nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Integritas**

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

### **2. Profesionalisme**

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

### **3. Sinergi**

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

### **4. Pelayanan**

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

### **5. Kesempurnaan**

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## **B. Penetapan Target Kinerja**

Sasaran Strategis (SS) didefinisikan sebagai pernyataan tentang suatu hal yang ingin dicapai (SS bersifat *output/outcome*) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses) atau apa yang seharusnya kita miliki (SS bersifat input).

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal serta Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk mengetahui pencapaian sasaran, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I pada awal Tahun 2024. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, serta target dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,57
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,56
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,89	Max	P/L	19%	42,22%	105,89
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,75
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,26
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,12%	Max	E/L	26%	57,78%	100,12
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,30%	Max	P/L	19%	42,22%	112,30
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,23
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,23%	Max	E/M	21%	100,00%	100,23
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	115,01
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,78%	Max	E/M	21%	50,00%	106,78
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,50%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,17
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,20%	Max	P/M	14%	33,33%	117,20
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,53%	Max	P/M	14%	33,33%	118,53
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,77%	Max	P/M	14%	33,33%	109,77
7	Penegakan hukum yang efektif							111,23
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	114,56%	Max	P/M	14%	26,92%	114,56
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,60%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,29
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19%	57,58%	111,82
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,99
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,03%	Max	P/M	14%	33,33%	109,45
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,13	Max	P/M	14%	33,33%	109,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>109,07</b>

Secara keseluruhan NKO KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 sebesar 109,07% mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu 108,62%.

## 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

### a. IKU 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

#### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	24,41%	50,15%	50,15%	73,88%	73,88%	100,13%	100,13%	
Capaian	120%	100,30%	100,30%	98,51%	98,51%	100,13%	100,13%	

#### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### 2. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1,513 triliun rupiah dengan capaian sebesar 100,13% dari target sebesar Rp 1,511 triliun rupiah. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 15,35%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan minus sebesar 49,90%.

Realisasi Tahun 2024 Per Kelompok Pajak

Kelompok Pajak	TARGET 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% PENCAPAIAN	% PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	823.884.148.000	840.413.801.803	694.124.948.889	102.01	21.08
B. PPN dan PPnBM	687.046.941.000	672.432.380.162	615.086.913.533	97.87	9.32
C. PBB dan BPHTB	-	21.100.188	38.809.932	0.00	-45.63
D. Pendapatan PPh DTP	-	2.150.280	2.355.851.144	0.00	-100.09
E. Pajak Lainnya	594.956.000	622.247.303	496.306.212	104.59	25.38
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.511.526.045.000	1.513.487.379.176	1.312.102.829.710	100.13	15.35

Sumber : Appportal, per 21 Januari 2025

Realisasi Tahun 2023 Per Kelompok Pajak

Kelompok Pajak	TARGET 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% PENCAPAIAN	% PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	917.087.306.000	692.587.035.844	2.020.021.032.585	75.52	-65.71
B. PPN dan PPnBM	284.424.412.000	610.184.536.800	561.408.309.512	214.53	8.69
C. PBB dan BPHTB	40.403.000	38.809.932	62.884.343	96.06	-32.28
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	-
E. Pajak Lainnya	22.944.000	496.296.212	88.400.174	2163.08	461.42
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.201.575.065.000	1.317.375.915.035	2.629.453.251.447	109.64	-49.90

Sumber : Appportal, per 21 Januari 2025

Perbandingan capaian nasional dan capaian unit dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Persentase Pertumbuhan Netto Tahun 2024

	% Pencapaian	% Pertumbuhan Netto
<b>Nasional</b>	100,46%	3,37%
<b>Kanwil DJP Jawa Timur I</b>	100,10%	15,35%
<b>KPP Pratama Surabaya Mulyorejo</b>	100,13%	7,42%

Sumber : Aplikasi Appportal DJP

Persentase capaian unit kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berada di atas capaian Kanwil dan berada di bawah capaian secara nasional. Sedangkan untuk persentase pertumbuhan netto, unit kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terlihat tumbuh positif dibandingkan pertumbuhan secara nasional maupun Kanwil.

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Tabel 4. Realisasi dalam Lima Tahun Terakhir

Nama IKU	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)
Realisasi Th 2020	102,31%	1.346.483.914.830	1.316.039.878.000
Realisasi Th 2021	93,17%	1.280.820.588.291	1.374.652.936.000
Realisasi Th 2022	112,47%	2.629.453.251.447	2.337.897.377.000
Realisasi Th 2023	103,48%	1.318.268.983.987	1.273.965.602.000
Realisasi Th 2024	100,13%	1.513.487.379.176	1.511.526.045.000

Sumber : Appportal, per 21 Januari 2025

Berdasarkan tabel diatas, Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 mengalami penurunan, tetapi dalam nominal rupiah mengalami kenaikan sebesar 196,111 miliar rupiah.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan target dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,13%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,35% dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak di tahun lalu yang mengalami minus sebesar 49,90%. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

#### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Isu utama

Pengawasan atas penerimaan rutin perlu dibuat skema waktu prioritas.

2. Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:  
Tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak yang belum maksimal.
3. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
  - a. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas setoran rutin tahun sebelum yang belum sepenuhnya terbayarkan (dinamisasi pembayaran).
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penyampaian SPT Tahunan yang belum disampaikan dan/atau yang mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan yang terdapat pembayaran masa maupun terdapat perbedaan antara yang dilaporkan dengan dibayarkan dan pengawasan tindak lanjut data yang telah disampaikan tahun sebelumnya namun belum terealisasi oleh WP.
  - c. Melakukan analisis mandiri, analisis resiko, dan analisis data internal terhadap SPT Tahunan yang disampaikan termasuk SPT Tahunan tahun sebelumnya yang terdapat potensi, serta mengusulkan pemeriksaan.
  - d. Melakukan pengawasan terhadap data pihak ketiga yang harus ditindaklanjuti (data internal dan eksternal) serta melakukan mirroring hasil pemeriksaan.
  - e. Meningkatkan himbauan dengan memanfaatkan data-data internal pada aplikasi approweb (data pemicu dan penguji), aplikasi apportal (PK-PM, faktur pajak 000, dll) dan data eksternal.
  - f. Membuat proyeksi penerimaan Triwulan I.
  - g. Memastikan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara optimal dengan membayar tepat waktu, dan jika terlambat membayar dan melapor untuk diingatkan dan dikeluarkan STP, selain itu dengan mempercepat realisasi dari kegiatan PKM.

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- a. Meningkatkan himbauan dengan memanfaatkan data-data internal pada aplikasi approweb (data pemicu dan penguji), aplikasi apportal (PK-PM, faktur pajak 000, dll) dan data eksternal
- b. Membuat proyeksi penerimaan bulanan

**b. IKU 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							Pol/KP
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	110,49%	103,17%	103,17%	103,47%	103,47%	105,89%	105,89%	
Capaian	110,49%	103,17%	103,17%	103,47%	103,47%	105,89%	105,89%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

3. Formula IKU

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

4. Realisasi IKU

Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi Mandor, realisasi pertumbuhan bruto di tahun 2024 sebesar 15,07% dan realisasi indeks deviasi masih dalam rentang 100% yaitu deviasi sebesar 6,87%.

Realisasi Pertumbuhan Bruto 2024

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
1.538.763.195.584	1.337.293.681.956	15,07%	115,07%	109,57%	111,77%

## Realisasi Deviasi 2024

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4		
1.472.413.008.000	1.513.487.379.176	6.87%	2.14%	18.19%	5.53%	1.63%	6.87%	100.00%

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	tidak ada	tidak ada	tidak ada	109,61%	105,89%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	105,89%

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Daftar prioritas pengawasan secara sektoral untuk mengoptimalkan pertumbuhan penerimaan bruto.

Perhitungan deviasi perencanaan kas yang efektif dan akurat untuk mengoptimalkan nilai deviasi.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang belum optimal dan deviasi proyeksi perencanaan kas diatas batas maksimal.

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Mengolah dan menyampaikan Data-data yang diperoleh secara Top Down dari KPDJP, Data-data internal untuk diteruskan ke Seksi Pengawasan maupun Seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan maupun yang bersifat permintaan. Memanfaatkan data-data internal pada aplikasi approweb (data pemicu dan penguji), aplikasi apportal (PK-PM, faktur pajak 000, dll), Mandor dan data eksternal.

2. Membuat proyeksi penerimaan Triwulan I , membuat target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan membuat deviasi proyeksi rencana penerimaan tahun berjalan.

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melakukan evaluasi penerimaan bruto setiap bulan.
2. Melakukan evaluasi penerimaan bruto triwulanan.
3. Melakukan perencanaan dan evaluasi penerimaan, agar deviasi minimal.
4. Mengusulkan dalam hal menghitung pertumbuhan penerimaan agar tidak memperhitungkan penerimaan dari program PPS.

**2. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

**a. IKU 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	25,30%	51,17%	51,17%	76,30%	76,30%	100,12%	100,12%	
Capaian	120,00%	102,35%	102,35%	101,73%	101,73%	100,12%	100,12%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

Berdasarkan dashboard aplikasi mandor sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar 1,377 triliun rupiah dengan capaian 100,12% dari target.

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	50.272.125.161.000	50.317.777.850.594	100.09%	100.00%	100.09%
819 - PRATAMA SURABAYA MULYO REJO	1.375.877.534.000	1.377.528.290.211	100.12%	100.00%	100.12%

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	tidak ada	tidak ada	120,00%	105,43%	100,12%

Dari tahun ke tahun persentase realisasi penerimaan dari kegiatan PPM menurun, di tahun 2024 berada pada angka 100,12%.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,12%

#### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Isu utama

Memaksimalkan pengawasan Wajib Pajak untuk meningkatkan pembayaran masa.

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Tingkat kepatuhan Pembayaran Masa yang belum maksimal.

##### 3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- 1) Pengawasan pembayaran dan pelaporan
- 2) Dinamisasi angsuran pajak tahun berjalan (angsuran PPh Pasan 25)
- 3) Penelitian dan data matching

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas PPM

### b. IKU 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

#### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	81,88%	110,40%	110,40%	111,73%	111,73%	112,30%	112,30%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	112,30%	112,30%	

##### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

##### 2. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

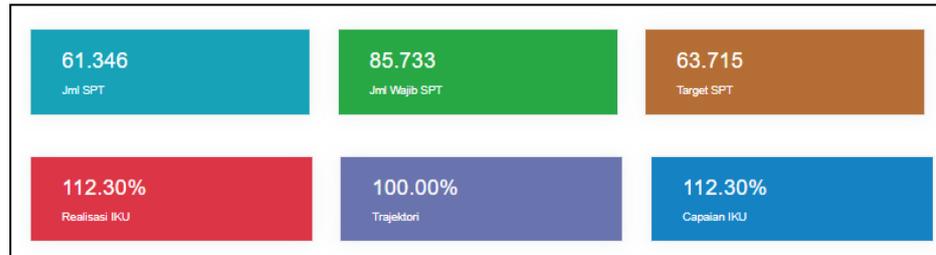
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

### 4. Realisasi IKU

#### Realisasi IKU Kepatuhan SPT 2024



Sumber : Aplikasi Mandor

### II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83,19%	90,69%	101,03%	100,66%	112,30%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan tren meningkat.

### III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

Tidak ada.

### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Isu utama

Inovasi dalam pelayanan dan penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

#### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

- 1) Terdapat resiko capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terealisasi.

- 2) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih menjadi tantangan.
3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
  - 1) Melakukan sosialisasi dan persuasi untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu
  - 2) Mengirimkan surat himbauan penyampaian SPT Tahunan Ke Wajib pajak
  - 3) Mengirimkan pesan Whatsapp Blast dan On Call penyampaian SPT Tahunan
  - 4) Melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan Bukti Potong PPh
  - 5) Melaksanakan sosialisasi ke Wajib Pajak dan Kantor Pemerintah
  - 6) Membuat Pojok Pajak di tempat Wajib Pajak besar
  - 7) Menjalankan asistensi pengisian SPT Tahunan di KPP
  - 8) Memasang atribut penyuluhan penyampaian SPT Tahunan di kantor pemerintah
  - 9) Memposting edukasi penyuluhan penyampaian SPT Tahunan di Media

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melakukan Edukasi pengisian SPT, halo SPT, dan membuat himbauan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan WP OP
2. Membuat himbauan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan WP Badan
3. Menghimbau WP TLTB OP dan Badan untuk melakukan pelaporan SPT
4. Mengintensifkan untuk penyampaian SPT
5. Menyampaikan surat teguran penyampaian SPT Tahunan

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

#### a. IKU 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

##### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	17,17%	38,94%	38,94%	53,56%	53,56%	100,23%	100,23%	
Capaian	68,67%	77,88%	77,88%	71,41%	71,41%	100,23%	100,23%	

#### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

## 2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

## 3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

## 4. Realisasi IKU

PKM		
Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
100.23%	100.00%	100.23%

Sumber : Aplikasi Mandor

## II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	tidak ada	120,00%	102,44%	86,41%	100,23%

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100.23%

IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

- 1) Tingginya Piutang Pajak yang Tidak Lancar
- 2) Resiko Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak yang Masih Rendah
- 4) SP2DK yang Tidak Terealisasi atau Tidak Responsif dari WP

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

- 1) Sebagian besar piutang pajak masuk dalam kategori Piutang Tidak lancar, diragukan dan macet
- 2) resiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- 3) Masih banyak WP yang belum melakukan pembayaran
- 4) SP2DK outstanding yang belum atau tidak terealisasi sesuai perkiraan awal dan/atau tidak direspon dengan baik oleh WP

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Penagihan:

- 1) Melakukan tindakan penagihan aktif yang dilakukan di kantor berupa teguran, blokir, sita, pemindahbukuan (penjualan aset sita dan cegah)
- 2) Melakukan penagihan persuasif dengan mengadakan Kegiatan P4 (Percepatan Pencairan Piutang Pajak)

Pemeriksaan :

Selalu mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi SKPKB hasil pemeriksaan yang telah disetujui.

1) Melakukan himbauan SP2DK atas data yang diperoleh dari internal dan eksternal:

- CRM di approweb
- Faktur pajak 000

- Data pajak keluaran pajak masukan (PKPM)
  - Laporan hasil analisis (LHA) dari kanwil atau kantor pusat
  - Data yang diperoleh dari kunjungan visit ke lapangan (Pengamatan KMS)
  - Data dari bea dan cukai
  - Data yang bersumber dari media masa dan media sosial
- 2) Analisis dan data matching, meliputi:
- Penelitian atas data pemicu, penguji atau laporan penilaian
  - Pemanfaatan data alket
- 3) Penerbitan STP

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Mengundang WP untuk pembahasan
2. Penyelesaian SP2DK Outstanding dan SP2DK dari DPP semester I dan II
3. Penambahan DPP semester II melalui usulan DPP mandatori

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

##### a. IKU 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

##### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	42,01%	83,56%	83,56%	79,95%	79,95%	88,80%	88,80%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	

##### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

##### 2. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

## 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

## 3. Formula IKU

IKU EP =

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

## 4. Realisasi IKU

### Rekapitulasi Data

Σ Rencana Kegiatan :	21,351	
Σ Realisasi Kegiatan:	78,287	366.67%
Σ Realisasi Kegiatan Diikuti:	21,351	100.00%
<b>Rasio Kegiatan:</b>		<b>18.50%</b>
Σ Target Perubahan Perilaku :	50,950	
Σ Realisasi Perubahan Perilaku Bayar :	50,117	98.37%
<b>Rasio Perubahan Perilaku Bayar :</b>		<b>42.18%</b>
Σ Realisasi Perubahan Perilaku Laporan :	62,456	120.00%
<b>Rasio Perubahan Perilaku Laporan :</b>		<b>28.12%</b>
Realisasi IKU (Total Rasio) :		88.80%
<b>Capaian IKU (Q1 : 10%) :</b>		<b>120.00%</b>

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	120,00%	120,00%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

#### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Isu utama

Pemilihan dan pemanfaatan Daftar Sasaran Penyuluhan belum optimal.

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

1) kegiatan edukasi penyuluhan belum secara signifikan menimbulkan efek ganda bagi wajib pajak lainnya

2) Penetapan Daftar Sasaran Penyuluhan tetap diberikan secara top down

##### 3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1) Melakukan edukasi secara reguler terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan

2) Melaksanakan program tema 1

3) Mempelajari Daftar DSPT yang ditetapkan

4) Membagi secara proposional setiap sasaran ke setiap penyuluh

5) Melakukan pendekatan dengan menjalin komunikasi ke Wajib Pajak

6) Menetapkan program dan penyampaian target perilaku yang diharapkan

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Menetapkan rencana strategis kegiatan yang dilakukan untuk wajib pajak yang masuk dalam daftar sasaran

2. Melakukan edukasi dan penyuluhan dengan berbagai macam kanal secara luring dan daring yang menyentuh langsung ke wajib pajak

#### b. IKU 4b-N: Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

##### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	5%	10%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6,30%	12,61%	12,61%	18,00%	18,00%	106,78%	106,78%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	106,78%	106,78%	

##### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

## 2. Definisi IKU

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

## 3. Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

## 4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Indeks Capaian
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,78%	106,78

## II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	tidak ada	114,24%	111,89%	120,00%	106.78%

## III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

## IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### 1. Isu utama

- 1) Partisipasi Responden yang Masih Belum Maksimal
- 2) Perbedaan Standar Kepuasan Wajib Pajak
- 3) Tantangan dalam Penyebaran dan Pengumpulan Data Survei

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:
  - 1) Partisipasi responden yang masih belum maksimal
  - 2) Tingkat kepuasan wajib pajak mempunyai standar yang berbeda
3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
  - 1) Mencetak barcode link di meja TPT/helpdesk
  - 2) Membuat list sasaran responden
  - 3) Membuat rencana longlist calon responden survey efektivitas dan pelayanan
  - 4) Melakukan himbauan pengisian survey atas layanan yang diberikan kepada wajib pajak

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Membuat analisa responden yang efektif dan dapat terhubung dengan baik
2. Sasaran responden yang dihimbau mengisi link survey adalah atas wajib pajak pada layanan unggulan perpajakan

### 5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

#### a. IKU 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

##### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	120,00%	106,62%	106,62%	113,47%	113,47%	118,50%	118,50%	
Capaian	120,00%	118,47%	118,47%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

#### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

#### 2. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

3. Formula IKU

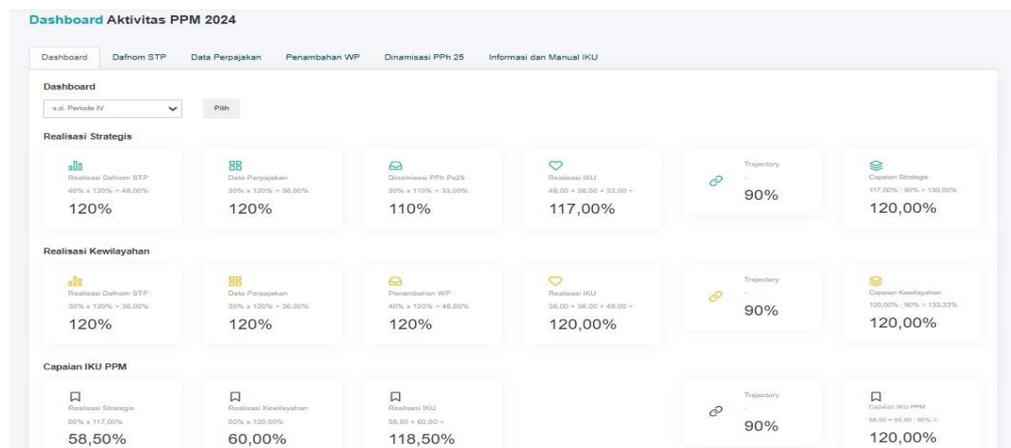
Persentase pengawasan pembayaran masa =

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

4. Realisasi IKU



II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	tidak ada	110,61%	117,29%	120,00%	120,00%

Kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa semakin membaik dan optimal di dua tahun terakhir bisa mencapai 120% dari target trajectory.

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	100%	100%	120,00%

IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Pengawasan Pembayaran Masa yang belum optimal untuk tiap kegiatan dan manajemen waktu.

2. Akar masalah
  - 1) Capaian persentase pembayaran masa yang belum optimal
  - 2) Penurunan omset dan kegiatan usaha
3. Tindakan yang telah dilaksanakan
  - 1) Melakukan himbauan SP2DK atas analisis dan data matching
  - 2) Melakukan pengawasan LHP2DK
  - 3) Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 antara lain perubahan keadaan usaha antara lain omset PPN dan aktifitas ekonomi tahun berjalan penerbitan STP

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melanjutkan kegiatan canvassing di sentra ekonomi (pasar, mall, jalan protokol)

### 6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

#### a. IKU 6a-CP: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

##### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	106,90%	106,90%	112,78%	112,78%	117,20%	117,20%	
Capaian	N/A	106,90%	106,90%	112,78%	112,78%	117,20%	117,20%	

##### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

##### 2. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

### 3. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

=

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

### 4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Indeks Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,20%	117,20

### II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	113,43%	109,15%	120,00%	120,00%	117,20%

### III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	117,20%

### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Isu utama

Manajemen waktu bagi level aktor dalam menyelesaikan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan perlu disusun dengan baik pada awal tahun.

#### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Resiko tidak tercapainya persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- 1) Menyusun target penerbitan SP2DK per AR Tahun 2023
- 2) Melakukan pemanfaatan dan analisis dan internal dan eksternal selama triwulan I tahun 2023
- 3) Melakukan analisis tindak lanjut atas penerbitan SP2DK
- 4) Menyusun Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- 5) Meneliti keakuratan Data DPP yang diinput oleh Seksi-seksi Pengawasan dan menetapkan tepat waktu sesuai time line

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- 1) Menyusun Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan
- 2) Wajib Pajak KPP tepat Waktu
- 3) Meneliti keakuratan Data DPP yang diinput oleh Seksi-seksi Pengawasan dan menetapkan tepat waktu sesuai time line
- 4) Melanjutkan kegiatan pemanggilan dan visit WP jika WP tidak respon
- 5) Usulan pemeriksaan terhadap WP yang tidak respon

**b. IKU 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	102,74%	113,50%	113,50%	115,56%	115,56%	118,53%	118,53%	
Capaian	102,74%	113,50%	113,50%	115,56%	115,56%	118,53%	118,53%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

### 3. Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

### 4. Realisasi IKU

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1				
2				
3	619. PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4				1,00 %

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo menempati peringkat tiga besar pada tingkat Kanwil untuk kinerja Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan.

### II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	120,00%	118,53%

### III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Isu utama

Pemanfaatan Data Pemicu dan data yang lain belum optimal

#### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Berkurangnya data pemicu yang tersedia

#### 3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Melakukan analisis dan pemanfaatan Data Pemicu selain tahun berjalan yang tersedia dan melakukan penerbitan STP dari Daftar Nominatif STP di Approweb selain tahun berjalan

Percepatan tindak lanjut kegiatan pemanfaatan data yang tersedia

### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Percepatan tindak lanjut kegiatan pemanfaatan data yang tersedia

**c. IKU 6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

**I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	95,50%	95,50%	95,51%	95,51%	109,77%	109,77%	
Capaian	120,00%	95,50%	95,50%	95,51%	95,51%	109,77%	109,77%	

**1. Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**2. Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Komponen 3 : Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

**3. Formula IKU**

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koeponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

**Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)**

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

**Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

**Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

=  $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

4. Realisasi IKU

NAMA_KPP	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)	KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)	KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)	REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	
PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	97,50%	111,29%	120,00%	109,77%

II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	109,77%

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Pengaturan manajemen waktu untuk kegiatan PKM dalam semua fungsi belum dilakukan secara optimal.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Terdapat laporan pelaksanaan komite kepatuhan yang terlambat untuk dilaporkan karena pergantian PIC, Rapot kinerja PKM yang rendah

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Menyelenggarakan rapat dan membuat laporan pelaksanaan komite kepatuhan tepat waktu

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melakukan pengawasan terhadap nilai PKM rapor unit kerja
2. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan bahan baku pemeriksaan

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

### a. IKU 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

#### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	98,80%	98,80%	114,56%	114,56%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	98,80%	98,80%	114,56%	114,56%	

#### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### 2. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

#### 3. Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\
 & \quad + \\
 & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)}
 \end{aligned}$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

#### 4. Realisasi IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	114,56%

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	114,56%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Penyiapan bahan baku pemeriksaan dan penilaian belum cukup berkualitas.

2. Analisis penyebab keribhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Bahan baku atas pemeriksaan dan penilaian

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- 1) Melakukan pembahasan usulan DSPP bersama Komite Kepatuhan KPP
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian
- 3) Melakukan percepatan pemeriksaan

- V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melakukan pengawasan terhadap SKP yang terbit di tahun berjalan
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelesaian penilaian tepat Waktu
3. Mengoptimalkan ketersediaan bahan baku pemeriksaan

## b. IKU 7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan

- I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	32,70%	53,79%	53,79%	73,93%	73,93%	96,60%	96,60%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

## 2. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

## 3. Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

## 4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Indeks Capaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,60%	120,00

Tingkat efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sudah melebihi target yaitu dengan realisasi 96,60% dengan indeks capaian 120%.

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	tidak ada	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	100%	100%	100%	120,00%

#### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### 1. Isu utama

- 1) Optimalisasi Kondisi JSPN yang Belum Maksimal di Lapangan
- 2) Kurangnya Kelengkapan Data dan Informasi
- 3) Keterbatasan dalam Tindakan Penagihan yang Diterapkan

##### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

- 1) Kondisi JSPN belum optimal ke lapangan
- 2) Kelengkapan bahan-bahan Data dan atau informasi yang belum memadai

##### 3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- 1) Melakukan tindakan penagihan aktif yang dilakukan di kantor berupa teguran, blokir, sita, pemindahbukuan (penjualan aset sita dan cegah)
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan aktif

#### V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melakukan penegakan hukum berupa SP, SPMP, Blokir dan Sita.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tindakan penagihan aktif

### c. IKU 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

#### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							Pol/KP
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

##### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

##### 2. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

### 3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

### 4. Realisasi IKU

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%

## II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	100,00%

## III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

## IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### 1. Isu utama

- 1) Keterbatasan Bahan Baku untuk Usulan Bukti Permulaan
- 2) Keterbatasan dalam Proses Persiapan Bukti Permulaan

### 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Bahan baku untuk usulan Bukti Permulaan terbatas

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Menyiapkan bahan baku usulan Bukti Permulaan

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Menyiapkan bahan baku usulan Bukti Permulaan

**8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan informasi yang berkualitas**

**a. IKU 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas							
	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	60,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

3) Formula IKU

**1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%**

**2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

**Realisasi Maksimal 120%**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

#### 4) Realisasi IKU

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	619. PRATAMA SURABAYA MULYOUREJO	144.70 %	120.00 %
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Total		146.60 %	120.00 %

Sumber : aplikasi Mandor

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	114,19%	120,00%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

- 1) Beban Kegiatan di Awal Tahun yang Menumpuk
- 2) Prioritas yang Terbatas dalam Penyediaan Data Potensi Perpajakan

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Banyaknya kegiatan yang dilakukan di awal tahun (terkait dengan penyampaian SPT dan pemenuhan permintaan data auditor eksternal)

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- 1) Data hasil KPDL direkam di aplikasi ALket SIDJP Nine
- 2) Kegiatan diprioritaskan kepada penyediaan data potensi perpajakan

- V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melanjutkan kegiatan penyediaan data potensi perpajakan
2. Melakukan kegiatan pengamatan

## b. IKU 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

### I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas							
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	0,00%	55%	55%	55,00%	55,00%	61,50%	61,50%	
Capaian	0,00%	120%	120%	120,00%	120,00%	111,82%	111,82%	

#### 1. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### 2. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

#### 3. Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$$

Realisasi Tahun 2024 =

+

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

#### 4. Realisasi IKU

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
1	200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I (DATA PROPINSI)	8	4	4	29	21	11	63,37
2	KPP PRATAMA	9	8	4	16	9	5	60,75

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	tidak ada	tidak ada	tidak ada	120,00%	111,82%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Keterbatasan dalam Proses Penerimaan dan Pengolahan Data ILAP dari Pihak Eksternal.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Proses yang Bergantung pada Aliran Data Top-Down dari Pihak Eksternal.

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Menerima, memproses dan mengolah data ILAP yang diterima pihak eksternal yang disampaikan secara top down baik dari Kanwil maupun KPDJP.

- V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Menerima, memproses dan mengolah data ILAP yang diterima pihak eksternal yang disampaikan secara top down baik dari Kanwil maupun KPDJP.

## 9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

### a. IKU 9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po//KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	105,39%	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%	
Capaian	105,39%	119,00%	119,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2. Definisi IKU

### Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

### Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

## 3. Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$

## 4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50

## II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	117,50%

III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Kinerja Pegawai dan Pejabat Eselon yang Belum Memenuhi Ketentuan UKOM

2. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Masih terdapat hasil UKOM pegawai dan JPM pejabat eselon yg dibawah Ketentuan.

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Memberi kesempatan kepada seluruh pegawai utk mengikuti IHT, Sosialisasi, Elearning maupun diklat

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Mengingatkan pegawai untuk melakukan e-Learning

## b. IKU 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85%	85%	85 (skala 100)	85 (skala 100)	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	93,03%	93,03%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	109,45%	109,45%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.
3. Formula IKU  
 $((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,03%	109,45

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	tidak ada	117,50%	111,39%	113,05%	109,45%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Skor Penilaian Wajib Pajak yang Belum Maksimal

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Masih terdapat penilaian dari WP dengan skor belum maksimal

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Memberikan layanan yg terbaik kepada wajib pajak

- 2) Selalu menyampaikan kepada WP bahwa layanan tidak dipungut biaya atau gratis

- 3) Membuat rencana daftar calon responden *survey*

- V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Memberikan layanan yg terbaik kepada wajib pajak

2. Selalu menyampaikan kepada WP bahwa layanan tidak dipungut biaya atau gratis

3. Membuat rencana daftar calon responden *survey*

**c. IKU 9c-N: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

**I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	
Realisasi	28,62%	59,75%	59,75%	87,79%	87,79%	98,13%	98,13%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,03%	109,03%	

**1. Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

**2. Definisi IKU**

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

**B. Implementasi Manajemen Risiko**

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang

dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

### 3. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

### 4. Realisasi IKU

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target TW IV	Realisasi	Indeks Capaian
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,13	109,03

### II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	109,03%

### III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tidak ada.

### IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### 1. Isu utama

Realisasi Mitigasi Risiko yang Tidak Optimal

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Realisasi mitigasi risiko tidak optimal

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1) Memastikan jadwal rapat DKO-MR dan kehadiran pimpinan sebelum tanggal 7 setiap bulan

2) Melakukan rapat NKO setiap bulan utk memastikan setiap IKU selalu hijau

V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Melaksanakan DKO-MR dan manajemen kinerja tepat waktu

**10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

**a. IKU 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

I. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120,00%	105,13%	105,13%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	105,13%	105,13%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

### 3. Formula IKU

Formula Tw I, dan II = Realisasi IKPA/95,0

Formula Tw III

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Formula Tw IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

### 4. Realisasi IKU

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	031	015	636143	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	Nilai	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.00			100.00					

- II. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	formula berbeda	formula berbeda	formula berbeda	108,00%	120,00%

- III. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	120,00%

- IV. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Isu utama

Nilai IKPA yang Tidak Optimal

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

Nilai IKPA tidak optimal

3. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Memastikan penyerapan anggaran dan kegiatan yg terkait dg IKPA sesuai ketentuan

- V. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Melakukan efisiensi belanja
- Memperbanyak capaian output
- Melakukan revisi / penyesuaian anggaran agar penyerapan optimal

## B. Realisasi Anggaran

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibiayai dari anggaran yang telah disediakan. Realisasi penyerapan anggaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp45.870.003.088,- dari pagu sebesar Rp45.965.130.000,- atau mencapai 98,41%. Rincian realisasi penyerapan anggaran secara lengkap dapat dilihat pada lampiran I.

## PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja								Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain		Transfer
1	015-636143	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	031	PAGU	988,983,000	3,728,327,000	1,247,820,000	0	0	0	0	0	0	5,965,130,000
				REALISASI	960,134,000	3,664,047,868	1,245,821,220							5,870,003,088
				PERSENTASE	(97.08%)	(98.28%)	(99.84%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.41%)
				SISA	28,849,000	64,279,132	1,998,780	0	0	0	0	0	0	95,126,912
<b>TOTAL</b>				PAGU	988,983,000	3,728,327,000	1,247,820,000	0	0	0	0	0	0	5,965,130,000
				REALISASI	960,134,000	3,664,047,868	1,245,821,220							5,870,003,088
				PERSENTASE	(97.08%)	(98.28%)	(99.84%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.41%)
				SISA	28,849,000	64,279,132	1,998,780	0	0	0	0	0	0	95,126,912

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo telah berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui berbagai langkah strategis. Dalam hal anggaran, menindaklanjuti instruksi dari kantor pusat dengan melakukan pemotongan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD), yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan memprioritaskan kegiatan yang lebih strategis. Sumber daya manusia (SDM) juga dilibatkan secara maksimal, dengan memastikan setiap SDM berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan satuan kerja (satker), sehingga tercipta kolaborasi yang lebih baik dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efisien. Untuk pemanfaatan aset, organisasi membangun fasilitas *Flexible Working Space* (FWS), yang diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang serta meningkatkan kolaborasi antar seksi dengan berbagi ruang secara lebih efisien. Selain itu, dalam teknologi informasi, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengikuti arahan dari kantor pusat untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan aplikasi yang mendukung kinerja, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan terintegrasi, serta mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan.

### D. Kinerja Lain-lain

Berikut adalah berbagai *achievement* berupa penghargaan yang berhasil diraih di tahun 2024 oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo maupun pegawainya

1. Account Representative Kewilayahan Terbaik Berdasarkan Rapor Kinerja 2023
2. Unit kerja dengan Capaian Efektivitas Pemeriksaan Tertinggi
3. Penghargaan *Account Representative* Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Kewilayahan Tahun 2024
4. Peringkat Pertama Kontributor Konten Terbanyak pada situs pajak.go.id di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024

## E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berkomitmen untuk melaksanakan efisiensi dalam pelaksanaan perbaikan dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini ditunjukkan selama tahun 2024, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo telah berhasil menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu. Semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, tindak lanjut terhadap penyampaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga berhasil diselesaikan dengan status tuntas, dengan indeks tindak lanjut mencapai 120%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Pencapaian kinerja instansi pemerintah dapat dilihat sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pencapaian visi, misi, dan strategi yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, laporan kinerja ini menggambarkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh instansi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang lebih besar, dan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Kinerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2024 telah tercapai dengan baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,13% dan termasuk dalam kriteria hijau. Dari 10 Sasaran Strategis yang ada di Tahun 2024 semua telah masuk dalam kriteria hijau.

Atas IKU dengan nilai *surplus* paling kecil terhadap target di Tahun 2024 telah dilakukan analisa atas kurang optimalnya pencapaian realisasi IKU dan rencana aksi kedepan yang dapat dilakukan untuk tahun berikutnya sebagai langkah antisipatif agar IKU dapat tercapai lebih optimal. Adapun rencana aksi kedepan yang dimaksud adalah dengan merekomendasikan:

1. Meningkatkan himbauan dengan memanfaatkan data-data internal pada aplikasi approweb (data pemicu dan penguji), aplikasi apportal (PK-PM, faktur pajak 000, dll) dan data eksternal
2. Membuat proyeksi penerimaan bulanan, perencanaan dan evaluasi penerimaan, agar deviasi minimal
3. Melakukan evaluasi penerimaan secara rutin dan berkala
4. Melakukan evaluasi penerimaan bruto triwulanan.
5. Melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas PPM
6. Melakukan edukasi dan penyuluhan dengan berbagai macam kanal secara luring dan daring yang menyentuh langsung ke wajib pajak
7. Membuat himbauan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan WP Badan

8. Menghimbau WP TLTB OP dan Badan untuk melakukan pelaporan SPT
9. Penyelesaian SP2DK Outstanding dan menetapkan rencana strategis kegiatan yang dilakukan untuk wajib pajak yang masuk dalam daftar sasaran
10. Melakukan percepatan pemeriksaan khusus untuk mencapai penerimaan PKM Pemeriksaan yang optimal
11. Melakukan pengawasan terhadap :
  - a. Nilai PKM rapor unit kerja
  - b. Pemenuhan bahan baku pemeriksaan
  - c. SKP yang terbit di tahun berjalan
  - d. Penyelesaian penilaian tepat Waktu
12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tindakan penagihan aktif
13. Menyiapkan bahan baku usulan Bukti Permulaan
14. Melakukan penyesuaian anggaran agar penyerapan optimal

Demikian Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi secara rinci dan transparan terkait tugas dan fungsi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Emri Mora Singarimbun

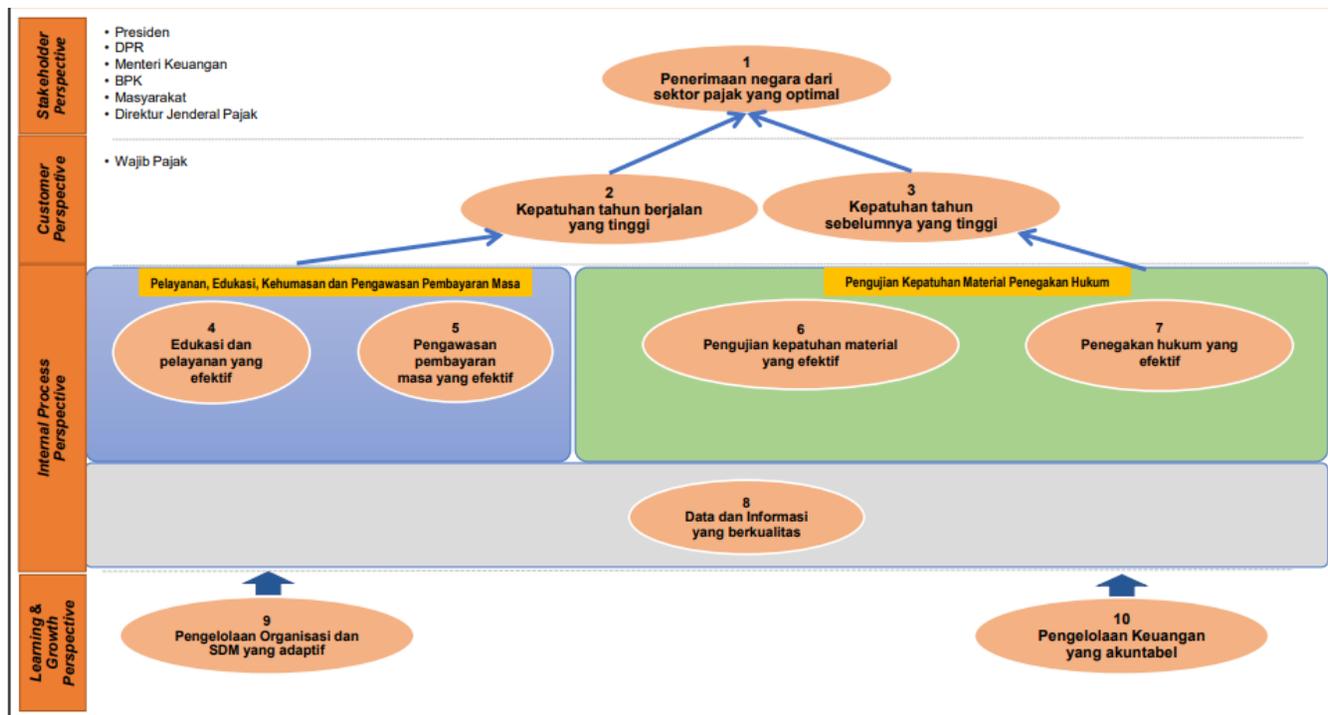




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-9/WPJ.11/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA**  
**MULYOOREJO**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA**  
**TIMUR I**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA  
MULYOOREJO  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

### Program/ Kegiatan Tahun 2024

### Anggaran

#### A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.447.857.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 665.739.000

Rp 425.968.000

Rp 356.150.000

#### B. Program Dukungan Manajemen

Rp 3.478.631.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 2.582.839.000

Rp 895.792.000

#### Total

**Rp 4.926.488.000**

Surabaya, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya  
Mulyorejo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sigit Danang Joyo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Emri Mora Singarimbun







Surabaya, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Surabaya Mulyorejo,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Emri Mora Singarimbun



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melakukan aktivitas pengawasan dan pendampingan atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pelayanan prima dan penyuluhan yang efektif kepada wajib pajak	1. Realisasi adanya perubahan perilaku lapor dan pembayaran pajak dari kegiatan edukasi dan penyuluhan	Q1-Q4: 1. Menyebarkan informasi kewajiban penyampaian SPT Tahunan melalui semua saluran komunikasi maupun media social 2. Menindaklanjuti daftar DSPT yang terbit 3. Melaksanakan penyuluhan dengan focus adanya perubahan perilaku lapor bayar 4. Melakukan monitoring dan evaluasi target atas kegiatan edukasi penyuluhan dalam hal adanya perubahan perilaku lapor dan bayar	Q1: 1. Surat himbuan dan undangan penyuluhan 2. Laporan Analisa pemenuhan kewajiban perpajakan 3. Daftar hadir, surat undangan, dan laporan edukasi 4. Melakukan input laporan ke Aplikasi Sisuluh	Januari-Desember 2024	Kepala Kantor	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2	Indeks efektivitas penyuluhan	Memberikan penyuluhan prima dan penyuluhan yang efektif kepada Wajib Pajak	Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak khususnya terhadap masalah-masalah perpajakan	<p>Q1: Menyebarkan informasi kewajiban penyampaian SPT Tahunan melalui semua saluran komunikasi maupun media social</p> <p>Q2: Menyempurnakan sarana dan prasaran area TPT</p> <p>Q3: Melaksanakan penyuluhan tematik disesuaikan dengan focus panggilan potensi pajak</p> <p>Q4: Meningkatkan kemampuan petugas front liner dan petugas penyuluh dengan diklat dan pelaksanaan IHT</p>	<p>Q1: SMS Blast, WA Blast, dan konten media social terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan</p> <p>Q2: Sarana dan prasaran pelayanan kepada Wajib Pajak bertambah menjadi lebih baik</p> <p>Q3: Daftar hadir Wajib Pajak, Surat undangan, laporan kegiatan penyuluhan</p> <p>Q4: Daftar usulan diklat front liner dan petugas penyuluh, daftar IHT, Laporan Kegiatan IHT</p>	Januari- Desember 2024	Kepala Kantor Pelayanan Pajak	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3	Persentase pengawasan pembayaran masa	Optimalisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa dengan memanfaatkan data baik dari internal maupun eksternal	Realisasi pembayaran pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa	Q1-Q4: 1. Melakukan himbauan SP2DK atas analisis dan data matching meliputi kegiatan: a. Penelitian atas data pemicu, penguji b. Penelitian data secara mandiri 2. Melakukan pengawasan LHP2DK 3. Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 antara lain perubahan keadaan usaha antara lain omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan penerbitan STP	Q1-Q4: 1. SP2DK 2. LHP2DK 3. STP 4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing seksi	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan	Menindaklanjuti dengan segera data baik internal maupun eksternal untuk dianalisa dan dijadikan dasar untuk permintaan penjelasan data dan/atau keterangan ke Wajib Pajak	Penerimaan pajak PKM yang tinggi dari hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun target penerbitan SP2DK per AR Tahun 2024</li> <li>2. Melakukan pemanfaatan dan analisis dan internal dan eksternal selama Triwulan I Tahun 2024</li> <li>3. Melakukan analisis tindak lanjut atas penerbitan SP2DK</li> </ol> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemanfaatan dan analisis dan internal dan eksternal selama Triwulan II Tahun 2024</li> <li>2. Melakukan analisis tindak lanjut atas penerbitan SP2DK</li> </ol>	<p>Q1-Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP2DK</li> <li>2. LHP2DK</li> </ol>	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Melakukan pemanfaatan dan analisis dan internal dan eksternal selama Triwulan III Tahun 2024 2. Melakukan analisis tindak lanjut atas penerbitan SP2DK  Q4: 1. Melakukan pemanfaatan dan analisis dan internal dan eksternal selama Triwulan IV Tahun 2024 2. Melakukan analisis tindak lanjut atas penerbitan SP2DK				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
5	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Menindaklanjuti dengan segera data Daftar Nominatif STP untuk diterbitkan STP dan Data Pemicu Wajib Pajak selain tahun berjalan untuk dianalisa dan dijadikan dasar untuk permintaan penjelasan data/atau keterangan ke Wajib Pajak	Penerimaan pajak PKM yang tinggi dari Pemanfaatan Data Pemicu selain tahun berjalan dan tindak lanjut Daftar Nominatif STP selain tahun berjalan	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan pemanfaatan Data Pemicu selain tahun berjalan yang tersedia di triwulan I tahun 2024</li> <li>Melakukan penerbitan STP dari Daftar Nominatif STP di Approweb selain tahun berjalan</li> </ol> <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan pemanfaatan Data Pemicu selain tahun berjalan yang tersedia di triwulan II tahun 2024</li> <li>Melakukan penerbitan STP dari Daftar Nominatif STP di Approweb selain tahun berjalan</li> </ol> <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisis dan pemanfaatan Data Pemicu selain tahun</li> </ol>	<p>Q1-Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SP2DK</li> <li>STP</li> </ol>	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				berjalan yang tersedia di triwulan III tahun 2024 2. Melakukan penerbitan STP dari Daftar Nominatif STP di Approweb selain tahun berjalan  Q4: 1. Melakukan analisis dan pemanfaatan Data Pemicu selain tahun berjalan yang tersedia di triwulan IV tahun 2024 2. Melakukan penerbitan STP dari Daftar Nominatif STP di Approweb selain tahun berjalan				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Tingkat Efektifitas Pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Pemeriksaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan seluruh nilai SKP disetujui WP	Q1-Q4: 1. Menyampaikan himbauan kepada pejabat fungsional pemeriksa pajak atas tunggakan yang belum selesai dan sisa waktu penyelesaian pemeriksaan sebelum jatuh tempo 2. Menyelesaikan pemeriksaan secepatnya terutama untuk pemeriksaan yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan 3. Mengupayakan agar Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk setuju atas hasil pemeriksaan	Q1-Q4: 1. Pejabat fungsional pemeriksa pajak menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu 2. Tunggakan pemeriksaan yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan dapat berkurang Seluruh nilai SKP disetujui dan dibayar oleh Wajib Pajak	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif sesuai dengan ketentuan	IKU Penagihan aktif dapat dilaksanakan secara efektif dan terealisasi melebihi target	<p>Q1 -Q4 :</p> <p>1. Berkoordinasi dengan pemeriksaan dan atau AR terkait Aset Wajib Pajak yang telah diperiksa/ dilakukan pengawasan</p> <p>Menerbitkan Surat Teguran, melakukan penagihan dengan Surat Paksa, melakukan penyitaan, melakukan penjualan barang, melakukan pencegahan</p>	<p>Q1-Q4:</p> <p>1. Laporan Hasil Kegiatan</p>	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Melakukan usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak melalui : 1. Investaris SP2DK Outstanding 2. Pengawasan LHP2DK usul riksus FGD untuk pembahasan usulan DSPP dari pengawasan	Penegakan hukum hasil pengawasan yang memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak	Q1 dan Q4: 1. Melakukan pembahasan komite Kepatuhan KPP terkait usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak yang sebelumnya dilakukan pengawasan 2. Menutup SP2DK terkait Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan dengan simpulan yang diusulkan pemeriksaan  Menyusun kertas kerja analisis usulan pemeriksaan	Q1-Q4 : 1. KKA LHP2DK	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan ; Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan; Fungsional Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam Komite Kepatuhan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Memaksimalkan produksi data alket dari kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD L) tercapai sesuai target	Jumlah data potensi pajak hasil KPD L tercapai sesuai target	Q1-Q4: Data hasil KPD L direkam di aplikasi Alket SDJP Nine, dievaluasi oleh kepala seksi terkait kurang dari 2 hari kerja dan validasi oleh kepala seksi PKD kurang dari 5 hari kerja	Q1-Q4 : Data hasil KPD L terekam di SIDJP Nine dan divalidasi oleh kepala seksi PKD tepat waktu	Januari- Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,V I	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
10.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Mengolah data ILAP yang diterima dari pihak eksternal tepat waktu	Jumlah data/Informasi yang diteruskan ke seksi terkait	Mengolah data ILAP yang diterima dari pihak eksternal	Q1-Q4: Data/Informasi ILAP	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi PKD	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
11.	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Memastikan Assesment Center dan Uji Kompetensi pegawai terlaksana dengan baik dan pegawai lulus uji kompetensi	Pegawai memiliki kompetensi sesuai jabatan	<p>Q1: Melaksanakan uji kompetensi pelaksana umum dalam rangka kenaikan jabatan and peringkat berdasarkan usulan tahun sebelumnya</p> <p>Q2: 1. Melaksanakan sosialisasi / IHT terkait standar kopetensi pegawai 2. Membuat daftar kebutuhan pelatihan seluruh pegawai 3. Melaksanakan Uji Kompetensi FUngsional Pemeriksaan dalam rangka penyesuaian nama jabatan</p> <p>Q3: Memantau pelaksanaan pelatihan seluruh pegawai</p> <p>Q4: 1. Melakukan penyesuaian kebutuhan pelatihan dalam hal terdapat mutasi pegawai</p>	<p>Q1: Kenaikan jabatan dan peringkat berdasarkan Uji Kompetensi</p> <p>Q2: 1. Pengetahuan standar kompetensi pegawai 2. Daftar kebutuhan pegawai 3. Penyesuaian nama jabatan fungsional</p> <p>Q3: Pelaksanakan Pelatihan pegawai secara menyeluruh</p> <p>Q4: 1. Penyesuaian kebutuhan pegawai karena mutase 2. Usulan uji kompetensi Hasil Evaluasi JPM pejabat struktural</p>	Januari- Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan KI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Membuat penelitian dan usulan uji kompetensi pelaksana umum untuk tahun berikutnya Melakukan evaluasi JPM pejabat struktural				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melakukan pelayanan dengan integritas dengan mengutamakan kepuasan Wajib Pajak	Indeks penilaian integritas unit tinggi dan Wajib Pajak puas dengan pelayanan KPP	Q1-Q4: Melakukan Monitoring Evaluasi 4 (Empat) Komponen survei melalui rapat pembinaan kantor IIb setiap triwulannya	Q1-Q4: Indeks pelayanan perpajakan, indeks pengawasan kepatuhan, indeks pemeriksaan pajak dan indeks penagihan pajak bagus dan mencapai target	Januari-Desember 2024	Kepala Kantor Pelayanan Pajak	-
13.	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Melaksanakan rapat DKP dan Mitigasi Risiko secara periodik untuk mengevaluasi dan membuat rencana NKO dan Laporan Mitigasi Risiko	Rapat DKO dan Mitigasi Risiko terlaksana tepat waktu dan efektif	Q1: 1. DKO untuk evaluasi NKO 2023 dan rencana aksi Tahun 2024 2. Rapat evaluasi mitigasi risiko 2023 dan rencana TW I tahun 2024 Q2: 1. DKO untuk evaluasi NKO TW I 2024 dan rencana aksi TW II Tahun 2024 2. Rapat evaluasi mitigasi risiko TW I 2024 dan Rencana Aksi TW II Tahun 2024 Q3: 1. DKO untuk evaluasi NKO TW II 2024 dan	Q1 : 1. Risalah DKO, foto, undangan, daftar hadir TW I 2024 2. LHR Laporan Mitigasi Risiko TW I 2024 Q2 : 1. Risalah DKO, foto, undangan, daftar hadir TW II 2024 2. LHR Laporan Mitigasi Risiko TW II 2024 Q3 : 1. Risalah DKO, foto, undangan, daftar hadir TW III 2024	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan KI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				rencana aksi TW III Tahun 2024 2. Rapat evaluasi mitigasi risiko TW II 2024 dan Rencana Aksi TW III Tahun 2024 Q3: 1. DKO untuk evaluasi NKO TW III 2024 dan rencana aksi TW III Tahun 2024 Rapat evaluasi mitigasi risiko TW IV 2024 dan Rencana Aksi TW III Tahun 2024	2. LHR Laporan Mitigasi Risiko TW III 2024 Q4 : 1. Risalah DKO, foto, undangan, daftar hadir TW IV 2024 LHR Laporan Mitigasi Risiko TW IV 2024			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
14.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Melaksanakan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab dan ankuntabel sehingga kebutuhan kantor bisa terpenuhi dengan baik	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai yang direncanakan	Q1: Menginventarisasi kelengkapan dokumen dan pelaksanaan belanja barang dan pegawai Q2: Menginventarisasi kelengkapan dokumen dan pelaksanaan belanja barang, pegawai dan barang modal Q3: Memastikan semua kelengkapan dokumen, jumlah barang modal dan pelaksanaan belanja barang dan pegawai Q4: Melaksanakan belanja barang dan pegawai serta memastikan ketersediaan dana hingga akhir tahun 2024	Q1: Dokumen lengkap dan pelaksanaan belanja barang dan pegawai sesuai target Q2: Dokumen lengkap dan pelaksanaan belanja barang , pegawai dan barang modal Q3: Dokumen sesuai dengan jumlah dan spesifikasi pelaksanaan belanja barang dan pegawai Q4 : Tersedianya dana sarana dan prasarana sesuai yang direncanakan	Januari- Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan KI	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo,



Ditandatangani Secara Elektronik

Emri Mora Singarimbun



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Emri Mora Singarimbun	NAMA	Sigit Danang Joyo	
NIP	197203311998031002	NIP	197604072002121001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis

		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik</p>

PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

PERILAKU KERJA

-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah  
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Emri Mora Singarimbun  
197203311998031002



Ditandatangani secara elektronik

Sigit Danang Joyo  
197604072002121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	110 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Emri Mora Singarimbun  
197203311998031002

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sigit Danang Joyo  
197604072002121001



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 1 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>5,953,182,000</b>	<b>0</b>	<b>4,510,851,949</b>	<b>1,359,151,139</b>	<b>5,870,003,088</b>	<b>98.60 %</b>	<b>83,178,912</b>
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,204,352,000	0	1,001,751,232	189,933,740	1,191,684,972	98.95 %	12,667,028
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	500,456,000	0	441,403,534	58,608,000	500,011,534	99.91 %	444,466
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>500,456,000</b>	<b>0</b>	<b>441,403,534</b>	<b>58,608,000</b>	<b>500,011,534</b>	<b>99.91 %</b>	<b>444,466</b>
<b>BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi</b>	<b>158,763,000</b>	<b>0</b>	<b>110,760,800</b>	<b>47,924,250</b>	<b>158,685,050</b>	<b>99.95 %</b>	<b>77,950</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>158,763,000</b>	<b>0</b>	<b>110,760,800</b>	<b>47,924,250</b>	<b>158,685,050</b>	<b>99.95 %</b>	<b>77,950</b>
005.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	158,763,000	0	110,760,800	47,924,250	158,685,050	99.95 %	77,950
521211 Belanja Bahan	142,296,000	0	94,294,500	47,924,250	142,218,750	99.95 %	77,250
000009. Seminar Kit	142,296,000	0	94,294,500	47,924,250	142,218,750	99.95 %	77,250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,467,000	0	11,466,300	0	11,466,300	99.99 %	700
000011. Sarana Layanan Komunikasi	11,467,000	0	11,466,300	0	11,466,300	99.99 %	700
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000013. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
<b>BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data</b>	<b>341,693,000</b>	<b>0</b>	<b>330,642,734</b>	<b>10,683,750</b>	<b>341,326,484</b>	<b>99.89 %</b>	<b>366,516</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>341,693,000</b>	<b>0</b>	<b>330,642,734</b>	<b>10,683,750</b>	<b>341,326,484</b>	<b>99.89 %</b>	<b>366,516</b>
005.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	341,693,000	0	330,642,734	10,683,750	341,326,484	99.89 %	366,516
521211 Belanja Bahan	192,076,000	0	181,026,800	10,683,750	191,710,550	99.81 %	365,450
000001. Seminar Kit	163,682,000	0	152,958,000	10,683,750	163,641,750	99.98 %	40,250
000002. Spanduk/Backdrop/Banner	5,994,000	0	5,994,000	0	5,994,000	100.00	0
000003. Makan Rapat Biasa	8,640,000	0	8,395,100	0	8,395,100	97.17 %	244,900
000004. Snack Rapat Biasa	13,760,000	0	13,679,700	0	13,679,700	99.42 %	80,300
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000157. Honor Pakar/Praktisi/Profesional	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143,316,000	0	143,315,934	0	143,315,934	100.00	66
000007. Perjalanan Dinas Biasa	143,316,000	0	143,315,934	0	143,315,934	100.00	66

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 2 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000008. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	443,695,000	0	407,741,335	30,094,500	437,835,835	98.68 %	5,859,165
<b>BMB Komunikasi Publik</b>	<b>443,695,000</b>	<b>0</b>	<b>407,741,335</b>	<b>30,094,500</b>	<b>437,835,835</b>	<b>98.68 %</b>	<b>5,859,165</b>
<b>BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan</b>	<b>265,851,000</b>	<b>0</b>	<b>248,684,316</b>	<b>16,392,000</b>	<b>265,076,316</b>	<b>99.71 %</b>	<b>774,684</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>265,851,000</b>	<b>0</b>	<b>248,684,316</b>	<b>16,392,000</b>	<b>265,076,316</b>	<b>99.71 %</b>	<b>774,684</b>
100.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	265,851,000	0	248,684,316	16,392,000	265,076,316	99.71 %	774,684
521211 Belanja Bahan	115,251,000	0	115,238,975	0	115,238,975	99.99 %	12,025
000021. Makan Rapat Biasa	15,435,000	0	15,425,775	0	15,425,775	99.94 %	9,225
000022. Snack Rapat Biasa	22,692,000	0	22,690,400	0	22,690,400	99.99 %	1,600
000023. Seminar Kit	72,328,000	0	72,327,600	0	72,327,600	100.00	400
000024. Spanduk/Backdrop/Banner	4,796,000	0	4,795,200	0	4,795,200	99.98 %	800
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	119,400,000	0	104,502,543	14,830,000	119,332,543	99.94 %	67,457
000025. IHT	54,000,000	0	43,418,900	10,530,000	53,948,900	99.91 %	51,100
000026. ICV	65,400,000	0	61,083,643	4,300,000	65,383,643	99.97 %	16,357
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,200,000	0	28,942,798	1,562,000	30,504,798	97.77 %	695,202
000027. Perjalanan Dinas Biasa	31,200,000	0	28,942,798	1,562,000	30,504,798	97.77 %	695,202
<b>BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan</b>	<b>177,844,000</b>	<b>0</b>	<b>159,057,019</b>	<b>13,702,500</b>	<b>172,759,519</b>	<b>97.14 %</b>	<b>5,084,481</b>
<b>100 Tanpa Komponen</b>	<b>177,844,000</b>	<b>0</b>	<b>159,057,019</b>	<b>13,702,500</b>	<b>172,759,519</b>	<b>97.14 %</b>	<b>5,084,481</b>
100.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	177,844,000	0	159,057,019	13,702,500	172,759,519	97.14 %	5,084,481
521211 Belanja Bahan	120,244,000	0	107,936,320	7,944,500	115,880,820	96.37 %	4,363,180
000014. Snack Rapat Biasa	25,300,000	0	18,164,000	6,174,500	24,338,500	96.20 %	961,500
000015. Makan Rapat Biasa	11,250,000	0	6,378,020	1,770,000	8,148,020	72.43 %	3,101,980
000016. Seminar Kit	78,694,000	0	78,693,450	0	78,693,450	100.00	550
000017. Spanduk/Backdrop/Banner	5,000,000	0	4,700,850	0	4,700,850	94.02 %	299,150
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54,000,000	0	51,120,699	2,158,000	53,278,699	98.66 %	721,301

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 3 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000018. Sarana Layanan	4,000,000	0	1,725,699	2,158,000	3,883,699	97.09 %	116,301
000019. Tax Gathering/Pajak Bertutur/TGTC/BDS	50,000,000	0	49,395,000	0	49,395,000	98.79 %	605,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
000020. Honor Pakar/Praktisi/Profesional	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	260,201,000	0	152,606,363	101,231,240	253,837,603	97.55 %	6,363,397
<b>BCE Penanganan Perkara</b>	<b>76,218,000</b>	<b>0</b>	<b>27,104,000</b>	<b>45,025,000</b>	<b>72,129,000</b>	<b>94.64 %</b>	<b>4,089,000</b>
<b>BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif</b>	<b>76,218,000</b>	<b>0</b>	<b>27,104,000</b>	<b>45,025,000</b>	<b>72,129,000</b>	<b>94.64 %</b>	<b>4,089,000</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>76,218,000</b>	<b>0</b>	<b>27,104,000</b>	<b>45,025,000</b>	<b>72,129,000</b>	<b>94.64 %</b>	<b>4,089,000</b>
100.OA KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	76,218,000	0	27,104,000	45,025,000	72,129,000	94.64 %	4,089,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64,064,000	0	14,950,000	45,025,000	59,975,000	93.62 %	4,089,000
000029. Biaya Pengumuman Lelang	3,714,000	0	0	2,775,000	2,775,000	74.72 %	939,000
000030. Biaya Penyampaian Surat Paksa	53,150,000	0	13,150,000	36,850,000	50,000,000	94.07 %	3,150,000
000031. Biaya Penyampaian SPMP	7,200,000	0	1,800,000	5,400,000	7,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,854,000	0	11,854,000	0	11,854,000	100.00	0
000032. Perjalanan Dinas Biasa	11,854,000	0	11,854,000	0	11,854,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000033. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
<b>BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan</b>	<b>183,983,000</b>	<b>0</b>	<b>125,502,363</b>	<b>56,206,240</b>	<b>181,708,603</b>	<b>98.76 %</b>	<b>2,274,397</b>
<b>BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan</b>	<b>61,426,000</b>	<b>0</b>	<b>59,223,576</b>	<b>1,000,000</b>	<b>60,223,576</b>	<b>98.04 %</b>	<b>1,202,424</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>61,426,000</b>	<b>0</b>	<b>59,223,576</b>	<b>1,000,000</b>	<b>60,223,576</b>	<b>98.04 %</b>	<b>1,202,424</b>
100.OA KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	61,426,000	0	59,223,576	1,000,000	60,223,576	98.04 %	1,202,424
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,926,000	0	59,223,576	500,000	59,723,576	99.66 %	202,424
000034. Perjalanan Dinas Biasa	59,926,000	0	59,223,576	500,000	59,723,576	99.66 %	202,424
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	500,000	500,000	33.33 %	1,000,000
000035. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	1,500,000	0	0	500,000	500,000	33.33 %	1,000,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 4 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>BIG.004</b> Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	96,250,000	0	39,993,254	55,206,240	95,199,494	98.91 %	1,050,506
<b>005</b> Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	96,250,000	0	39,993,254	55,206,240	95,199,494	98.91 %	1,050,506
005.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	96,250,000	0	39,993,254	55,206,240	95,199,494	98.91 %	1,050,506
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81,250,000	0	28,993,254	52,206,240	81,199,494	99.94 %	50,506
000038. Perjalanan Dinas Biasa	81,250,000	0	28,993,254	52,206,240	81,199,494	99.94 %	50,506
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	93.33 %	1,000,000
000039. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	15,000,000	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	93.33 %	1,000,000
<b>BIG.005</b> Laporan Penilaian	26,307,000	0	26,285,533	0	26,285,533	99.92 %	21,467
<b>100</b> Tidak Ada Komponen	26,307,000	0	26,285,533	0	26,285,533	99.92 %	21,467
100.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	26,307,000	0	26,285,533	0	26,285,533	99.92 %	21,467
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,307,000	0	26,285,533	0	26,285,533	99.92 %	21,467
000036. Perjalanan Dinas Biasa	26,307,000	0	26,285,533	0	26,285,533	99.92 %	21,467
WA Program Dukungan Manajemen	4,748,830,000	0	3,509,100,717	1,169,217,399	4,678,318,116	98.52 %	70,511,884
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,759,847,000	0	2,697,747,717	1,020,436,399	3,718,184,116	98.89 %	41,662,884
<b>CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	95,849,000	0	79,102,800	16,028,400	95,131,200	99.25 %	717,800
<b>CAN.003</b> Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	95,849,000	0	79,102,800	16,028,400	95,131,200	99.25 %	717,800
<b>100</b> Tidak ada komponen	95,849,000	0	79,102,800	16,028,400	95,131,200	99.25 %	717,800
100.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	69,349,000	0	52,684,800	16,028,400	68,713,200	99.08 %	635,800
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69,349,000	0	52,684,800	16,028,400	68,713,200	99.08 %	635,800
000094. Lensa Kamera Mirrorless	8,118,000	0	7,530,000	0	7,530,000	92.76 %	588,000
000099. Televisi 55 inch	39,995,000	0	39,960,000	0	39,960,000	99.91 %	35,000
000100. Perangkat Audio - Mixer	5,200,000	0	5,194,800	0	5,194,800	99.90 %	5,200
000129. Media Penyimpanan - Harddisk	16,036,000	0	0	16,028,400	16,028,400	99.95 %	7,600
100.TC Printer/Scanner	26,500,000	0	26,418,000	0	26,418,000	99.69 %	82,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,500,000	0	26,418,000	0	26,418,000	99.69 %	82,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 5 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000095. Printer - Printer NPWP	26,500,000	0	26,418,000	0	26,418,000	99.69 %	82,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>2,512,027,000</b>	<b>0</b>	<b>2,165,810,787</b>	<b>306,552,109</b>	<b>2,472,362,896</b>	<b>98.42 %</b>	<b>39,664,104</b>
<b>EBA.001 Kerumahtangaan</b>	<b>45,015,000</b>	<b>0</b>	<b>14,927,946</b>	<b>5,417,000</b>	<b>20,344,946</b>	<b>45.20 %</b>	<b>24,670,054</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>45,015,000</b>	<b>0</b>	<b>14,927,946</b>	<b>5,417,000</b>	<b>20,344,946</b>	<b>45.20 %</b>	<b>24,670,054</b>
100.OA KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	45,015,000	0	14,927,946	5,417,000	20,344,946	45.20 %	24,670,054
521211 Belanja Bahan	14,875,000	0	5,927,446	4,067,000	9,994,446	67.19 %	4,880,554
000079. Makan Rapat Biasa	2,700,000	0	0	0	0	0.00 %	2,700,000
000080. Snack Rapat Biasa	12,175,000	0	5,927,446	4,067,000	9,994,446	82.09 %	2,180,554
522151 Belanja Jasa Profesi	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000148. Honor Rohaniwan	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,540,000	0	8,500,500	750,000	9,250,500	41.04 %	13,289,500
000081. Perjalanan Dinas Biasa	22,540,000	0	8,500,500	750,000	9,250,500	41.04 %	13,289,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	500,000	200,000	700,000	9.72 %	6,500,000
000082. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	7,200,000	0	500,000	200,000	700,000	9.72 %	6,500,000
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>2,467,012,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,882,841</b>	<b>301,135,109</b>	<b>2,452,017,950</b>	<b>99.39 %</b>	<b>14,994,050</b>
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>2,467,012,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,882,841</b>	<b>301,135,109</b>	<b>2,452,017,950</b>	<b>99.39 %</b>	<b>14,994,050</b>
002.OA KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	2,467,012,000	0	2,150,882,841	301,135,109	2,452,017,950	99.39 %	14,994,050
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	772,573,000	0	669,911,940	102,506,912	772,418,852	99.98 %	154,148
000040. Pakaian Dinas Pegawai	123,168,000	0	123,167,820	0	123,167,820	100.00	180
000041. Pakaian Kerja Petugas Kebersihan/Pramubakti	7,700,000	0	7,614,600	0	7,614,600	98.89 %	85,400
000042. Honorarium Pengemudi dan Pramubakti	429,975,000	0	363,825,000	66,150,000	429,975,000	100.00	0
000043. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	211,280,000	0	174,880,520	36,356,912	211,237,432	99.98 %	42,568
000044. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	390,000	0	364,000	0	364,000	93.33 %	26,000
000045. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	176,585,000	0	143,451,320	26,842,800	170,294,120	96.44 %	6,290,880

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO**

Hal 6 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000047. Pengiriman Surat Dinas	176,585,000	0	143,451,320	26,842,800	170,294,120	96.44 %	6,290,880
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,232,000	0	49,968,000	10,752,000	60,720,000	93.08 %	4,512,000
000048. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12,432,000	0	9,368,000	2,072,000	11,440,000	92.02 %	992,000
000049. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00	0
000050. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,144,000	0	13,632,000	3,024,000	16,656,000	91.80 %	1,488,000
000051. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm	4,752,000	0	3,608,000	792,000	4,400,000	92.59 %	352,000
000052. Honorarium Bendahara Pengeluaran	4,128,000	0	3,152,000	688,000	3,840,000	93.02 %	288,000
000053. Honorarium Staf Pengelola	9,216,000	0	7,008,000	1,536,000	8,544,000	92.71 %	672,000
000054. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00	0
000055. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,200,000	0	1,000,000	200,000	1,200,000	100.00	0
000056. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	4,320,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	83.33 %	720,000
000057. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	928,709,000	0	829,955,200	98,272,323	928,227,523	99.95 %	481,477
000058. Barang Cetak	392,558,000	0	327,623,050	64,890,450	392,513,500	99.99 %	44,500
000059. Barang Konsumsi ATK	293,460,000	0	275,426,936	17,977,500	293,404,436	99.98 %	55,564
000060. Obat-obatan	105,000,000	0	99,082,464	5,888,973	104,971,437	99.97 %	28,563
000061. Perlengkapan Printer/Komputer	137,691,000	0	127,822,750	9,515,400	137,338,150	99.74 %	352,850
522141 Belanja Sewa	105,505,000	0	83,018,936	21,622,134	104,641,070	99.18 %	863,930
000062. Sewa Mesin Fotokopi	84,305,000	0	68,450,186	15,378,384	83,828,570	99.43 %	476,430
000098. Sewa Scanner	21,200,000	0	14,568,750	6,243,750	20,812,500	98.17 %	387,500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,408,000	0	374,577,445	41,138,940	415,716,385	99.36 %	2,691,615
000063. Pemeliharaan AC Split	16,470,000	0	15,395,700	0	15,395,700	93.48 %	1,074,300
000064. Pemeliharaan Printer	6,210,000	0	6,194,650	0	6,194,650	99.75 %	15,350
000065. Pemeliharaan Sofa	29,290,000	0	29,289,250	0	29,289,250	100.00	750
000066. Pemeliharaan Sound System	9,000,000	0	8,972,360	0	8,972,360	99.69 %	27,640

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 7 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000067. Pemeliharaan Mesin Absensi	2,500,000	0	2,497,500	0	2,497,500	99.90 %	2,500
000068. Pemeliharaan Numerator (Mesin Antrian TPT)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000069. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	44,730,000	0	8,997,046	34,895,400	43,892,446	98.13 %	837,554
000070. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	184,700,000	0	182,236,966	2,203,140	184,440,106	99.86 %	259,894
000071. Pemeliharaan Alat Pendingin Lainnya	27,524,000	0	23,408,650	4,040,400	27,449,050	99.73 %	74,950
000072. Pemeliharaan APAR	2,654,000	0	2,654,000	0	2,654,000	100.00	0
000073. Pemeliharaan Faksimile	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000074. Pemeliharaan Inventaris Kantor	8,720,000	0	8,390,965	0	8,390,965	96.23 %	329,035
000075. Pemeliharaan Kamera CCTV	10,000,000	0	9,975,460	0	9,975,460	99.75 %	24,540
000076. Pemeliharaan LCD Projector	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	100.00	0
000077. Pemeliharaan Meja Kerja Besi/Metal	5,500,000	0	5,494,500	0	5,494,500	99.90 %	5,500
000078. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	67,160,000	0	67,120,398	0	67,120,398	99.94 %	39,602
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1,151,971,000</b>	<b>0</b>	<b>452,834,130</b>	<b>697,855,890</b>	<b>1,150,690,020</b>	<b>99.89 %</b>	<b>1,280,980</b>
<b>EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>594,805,000</b>	<b>0</b>	<b>452,834,130</b>	<b>141,042,150</b>	<b>593,876,280</b>	<b>99.84 %</b>	<b>928,720</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>594,805,000</b>	<b>0</b>	<b>452,834,130</b>	<b>141,042,150</b>	<b>593,876,280</b>	<b>99.84 %</b>	<b>928,720</b>
100.0A KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	594,805,000	0	452,834,130	141,042,150	593,876,280	99.84 %	928,720
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594,805,000	0	452,834,130	141,042,150	593,876,280	99.84 %	928,720
000096. Kursi Pejabat Es. III	9,999,000	0	9,990,000	0	9,990,000	99.91 %	9,000
000097. Kursi Hadap	23,988,000	0	23,976,000	0	23,976,000	99.95 %	12,000
000108. Microphone Ruang Rapat	13,700,000	0	13,530,900	0	13,530,900	98.77 %	169,100
000110. Meja Open Space	48,600,000	0	48,600,000	0	48,600,000	100.00	0
000111. Meja Kayu	25,200,000	0	24,975,000	0	24,975,000	99.11 %	225,000
000114. Lemari Loker	33,600,000	0	33,577,500	0	33,577,500	99.93 %	22,500
000115. Partisi Ruangan	11,500,000	0	11,499,600	0	11,499,600	100.00	400
000116. AC Standing 5PK	82,000,000	0	81,984,600	0	81,984,600	99.98 %	15,400

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Hal 8 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000117. Kursi Pegawai	89,950,000	0	89,910,000	0	89,910,000	99.96 %	40,000
000118. Mesin Antrian	36,878,000	0	36,877,530	0	36,877,530	100.00	470
000119. Kursi Besi	31,176,000	0	30,960,000	0	30,960,000	99.31 %	216,000
000120. Karpet	47,160,000	0	46,953,000	0	46,953,000	99.56 %	207,000
000130. AC Split 2PK	20,318,000	0	0	20,313,000	20,313,000	99.98 %	5,000
000131. APAR 9kg	3,920,000	0	0	3,918,300	3,918,300	99.96 %	1,700
000132. Access Door	40,950,000	0	0	40,947,900	40,947,900	99.99 %	2,100
000149. Partisi - FWS	25,974,000	0	0	25,974,000	25,974,000	100.00	0
000150. Sofa - Sofa 3 Seat	10,069,000	0	0	10,068,810	10,068,810	100.00	190
000151. Sofa - Sofa 2 Seat	4,079,000	0	0	4,078,140	4,078,140	99.98 %	860
000152. Lemari - Lemari TV	22,424,000	0	0	22,422,000	22,422,000	99.99 %	2,000
000153. Meja Pejabat Es. III	13,320,000	0	0	13,320,000	13,320,000	100.00	0
<b>EBB.004 Gedung/Bangunan</b>	<b>557,166,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,813,740</b>	<b>556,813,740</b>	<b>99.94 %</b>	<b>352,260</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>557,166,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556,813,740</b>	<b>556,813,740</b>	<b>99.94 %</b>	<b>352,260</b>
100.0A Renovasi Gedung/Bangunan Kantor	557,166,000	0	0	556,813,740	556,813,740	99.94 %	352,260
536111 Belanja Modal Lainnya	557,166,000	0	0	556,813,740	556,813,740	99.94 %	352,260
000133. Pekerjaan Penambahan Sekat Kaca Ruang Server	35,175,000	0	0	35,173,680	35,173,680	100.00	1,320
000134. Pekerjaan Pemasangan Smoke Detector	41,236,000	0	0	41,070,000	41,070,000	99.60 %	166,000
000135. Pekerjaan Peremajaan Kabel Jaringan	87,434,000	0	0	87,357,000	87,357,000	99.91 %	77,000
000136. Pekerjaan Penggantian Kabel Kelistrikan	47,064,000	0	0	47,064,000	47,064,000	100.00	0
000154. Pekerjaan Lantai - FWS	109,224,000	0	0	109,151,850	109,151,850	99.93 %	72,150
000155. Pekerjaan Dinding dan MPE - FWS	108,825,000	0	0	108,822,180	108,822,180	100.00	2,820
000156. Pekerjaan Plafon dan Aksesoris- FWS	128,208,000	0	0	128,175,030	128,175,030	99.97 %	32,970
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	988,983,000	0	811,353,000	148,781,000	960,134,000	97.08 %	28,849,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>988,983,000</b>	<b>0</b>	<b>811,353,000</b>	<b>148,781,000</b>	<b>960,134,000</b>	<b>97.08 %</b>	<b>28,849,000</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>988,983,000</b>	<b>0</b>	<b>811,353,000</b>	<b>148,781,000</b>	<b>960,134,000</b>	<b>97.08 %</b>	<b>28,849,000</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 636143 **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO**

Hal 9 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001 Gaji dan Tunjangan	988,983,000	0	811,353,000	148,781,000	960,134,000	97.08 %	28,849,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	988,983,000	0	811,353,000	148,781,000	960,134,000	97.08 %	28,849,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	963,588,000	0	791,157,000	147,172,000	938,329,000	97.38 %	25,259,000
000083. Uang Makan PNS Golongan I dan II	212,520,000	0	178,255,000	30,205,000	208,460,000	98.09 %	4,060,000
000084. Uang Makan PNS Golongan III	648,240,000	0	532,911,000	100,936,000	633,847,000	97.78 %	14,393,000
000085. Uang Makan PNS Golongan IV	102,828,000	0	79,991,000	16,031,000	96,022,000	93.38 %	6,806,000
512211 Belanja Uang Lembur	25,395,000	0	20,196,000	1,609,000	21,805,000	85.86 %	3,590,000
000086. Uang Lembur Gol IV	2,880,000	0	2,664,000	0	2,664,000	92.50 %	216,000
000087. Uang Lembur Gol III	12,960,000	0	11,010,000	450,000	11,460,000	88.43 %	1,500,000
000088. Uang Lembur Gol II	6,144,000	0	4,392,000	696,000	5,088,000	82.81 %	1,056,000
000089. Uang Makan Lembur Gol IV	410,000	0	246,000	0	246,000	60.00 %	164,000
000090. Uang Makan Lembur Gol III	1,776,000	0	1,184,000	148,000	1,332,000	75.00 %	444,000
000091. Uang Makan Lembur Gol II	1,225,000	0	700,000	315,000	1,015,000	82.86 %	210,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## PRESTASI KPP PRATAMA SURABAYA MULYOUREJO TAHUN 2024



Unit Kerja dengan Capaian Efektivitas Pemeriksaan Tertinggi Tahun 2023



Peringkat Tiga Kategori *Account Representative* Kewilayahan Terbaik Berdasarkan Rapor Kinerja 2023



Peringkat Pertama Kontributor Konten Terbanyak pada situs pajak.go.id di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2024



Penghargaan *Account Representative* Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Kewilayahan Tahun 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NOMOR 104, SURABAYA 60244  
TELEPON (031) 8482480; FAKSIMILE (031) 8481127; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-109/WPJ.11/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Sigit Danang Joyo;  
jabatan : Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

dengan ini menerangkan bahwa,

1. telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja *Account Representative* di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I untuk periode Januari s.d Juli 2024;
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada angka 1, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I menetapkan penghargaan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Strategis Madya;
  - b. Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Strategis Pratama;
  - c. Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Kewilayahan;
  - d. Rapor *Account Representative* 2024 Terbaik Strategis Madya;
  - e. Rapor *Account Representative* 2024 Terbaik Strategis Pratama;
  - f. Rapor *Account Representative* 2024 Terbaik Kewilayahan;
3. Pegawai pada angka 2 diberikan piagam penghargaan pada kegiatan Forum *Account Representative* Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024;
4. Selain pegawai pada angka 3, narasumber juga diberikan penghargaan sebagai pemateri dalam kegiatan Forum *Account Representative* Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun 2024.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penghargaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 September 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Timur I



Ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Joyo

Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3. Pegawai yang bersangkutan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR I

NOMOR: KEP-55/WPJ.11/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI DAN UNIT KERJA  
TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dalam bidang penataan pegawai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rencana strategis SDM perlu melembagakan pemberian penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Pegawai dan Unit Kerja Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Tahun 2023.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.01/2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.01/2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI DAN UNIT KERJA TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan pegawai dan unit kerja yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ini sebagai penerima Penghargaan Pegawai dan Unit Kerja Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Tahun 2023.
- KEDUA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 29 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Joyo



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
NOMOR KEP-55/WPJ.11/2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN  
PEGAWAI DAN UNIT KERJA TINGKAT KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA  
TIMUR I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI DAN UNIT KERJA  
TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I  
TAHUN 2023

1. JSPN Dengan Capaian Tindakan Penagihan & Pencairan Tunggalan Terbaik : 1. Ali Mahmudi  
NIP 19990428 201812 1 003  
2. Wahyu Sangaji  
NIP 19790820 200001 1 001  
3. Mochamad Soleh  
NIP 19680305 199403 1 001
2. *Account Representative* Kewilayahan Terbaik Berdasarkan Rapor Kinerja 2023 : 1. Dadang Nurcahyo  
NIP 19921020 201502 1 002  
2. Andi Andreas Manurung  
NIP 19870923 201012 1 005  
3. Rachmanu  
NIP 19840702 200312 1 002
3. *Account Representative* Strategis KPP Pratama Terbaik : 1. Agus Nugroho  
NIP 19780710 200003 1 001  
2. Wisnu Widiyatmoko  
NIP 19900706 201310 1 001  
3. Nadya Adelia  
NIP 19870715 200710 2 001
4. *Account Representative* KPP Madya Terbaik : 1. Nimas Septanti Nafi'ah  
NIP 19850916 200710 2 001  
2. R Hidayat  
NIP 19880122 200701 1 004  
3. Dian Irawan  
NIP 19781209 199903 1 001
5. Penelaah Keberatan Rutin dengan tingkat Pencapaian Penyelesaian Permohonan Keberatan dan Non Keberatan terbaik : Dimas Christian Maharsiputra Yohannes  
NIP 19870123 200812 1 004
6. Penelaah Keberatan Sidang Terbaik dengan Tingkat Penyelesaian Sengketa Banding dan Gugatan Terbaik : Abdul Rozaq  
NIP 19840308 200312 1 006
7. Penyuluh Pajak Terbaik di KPP dengan Perubahan : 1. Priyono  
NIP 19800623 200012 1 002

- Perilaku Pembayaran Pajak Terbesar : 2. Fransiscus Himawan Ardianto  
NIP 19821003 200412 1 001  
3. Antoni Eka Bali  
NIP 19911218 201411 1 003
8. Kelompok FPP dengan Penyelesaian LHP Pemeriksaan Khusus Tertinggi : 1. Ranu Sapto Iman Sudjono  
NIP 19700603 199003 1 002  
2. Andreas Tabah Wicaksono  
NIP 19730218 199302 1 001  
3. Andi Triantoro  
NIP 19770418 199903 1 004
9. Kategori Kepala Seksi Pengawasan Kewilayahan Terbaik Berdasarkan Rapor Kinerja 2023 : 1. Choirul Rozak  
NIP 19750602 199703 1 002  
2. Dwi Abri Tjahyadi  
NIP 19791005 200012 1 003  
3. Aji Hidayat  
NIP 19800510 200112 1 001
10. Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP Pratama Terbaik : 1. Sigit Setyawan  
NIP 19780211 200212 1 001  
2. Kusnanto  
NIP 19790610 200012 1 003  
3. Sugeng Wahono  
NIP 19750628 199602 1 001
11. Kepala Seksi Pengawasan KPP Madya Terbaik : 1. Yanti Rahayu  
NIP 19680121 199503 2 001  
2. Bambang Hariyono  
NIP 19721028 199803 1 002  
3. Nur Hasyim  
NIP 19690727 199803 1 001
12. Unit Kerja dengan Pencairan PKM Pengawasan Kewilayahan Terbaik : KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
13. Unit Kerja dengan Capaian PKM Penagihan Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Krembangan
14. Unit Kerja dengan *Success Rate* Tertinggi Kewilayahan : KPP Pratama Surabaya Gubeng
15. Unit Kerja dengan Capaian Penerimaan Terbaik : KPP Pratama Surabaya Tegalsari
16. Unit Kerja dengan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Terbaik : KPP Pratama Surabaya Tegalsari
17. Unit Kerja dengan *Success Rate* Tertinggi Strategis : KPP Pratama Surabaya Tegalsari

18. Unit Kerja dengan Capaian Nilai IKKPA Terbaik : KPP Pratama Surabaya Wonocolo
19. Unit Kerja dengan Realisasi HKT Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Tertinggi Tahun 2023 : KPP Pratama Surabaya Genteng
20. Unit Kerja dengan Pertumbuhan Penerimaan Terbaik : KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
21. Unit Kerja dengan Capaian Tertinggi Aspek Pelayanan Pada Survei Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan dan Kehumasan Tahun 2023 : KPP Pratama Surabaya Sawahan
22. Unit Kerja dengan Proporsi Tertinggi Jumlah Pokok Pajak Dan Sanksi PSA Terhadap Penerimaan : KPP Pratama Surabaya Sawahan
23. Unit Kerja dengan Capaian PKM Total Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Rungkut
24. Unit Kerja dengan Capaian PKM Pengawasan Strategis Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Rungkut
25. Unit Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Rungkut
26. Unit Kerja dengan Realisasi Pembinaan MFWP Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Karangpilang
27. Unit Kerja dengan Realisasi Efektivitas Pemeriksaan Tertinggi : KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
28. Unit Kerja dengan *Success Rate* Pengawasan WP Strategis Tertinggi : KPP Madya Surabaya
29. Unit Kerja dengan Setoran Perubahan Perilaku Bayar Terbesar Atas Kegiatan Penyuluhan Tahun 2023 Terbesar : KPP Madya Dua Surabaya
30. Supervisor FPP dengan Kontribusi terhadap : 1. Edward Hermawan Simanungkalit  
NIP 19720615 199203 1 001

- Penerimaan Kantor Tertinggi
2. Petrus Joko Prasetyo  
NIP 19721225 199303 1 002
3. Muhammad Teguh Yuliansyah  
NIP 19760705 199603 1 001
31. Ketua Tim FPP dengan Kontribusi Terhadap Penerimaan Kantor Tertinggi : 1. Muchibbin Jihad  
NIP 19711225 199201 1 001
2. Sukarto  
NIP 19691204 198912 1 001
3. Budi Santoso  
NIP 19750404 199502 1 001
32. Fungsional Penilai Terbaik : 1. Haris Firdaus  
NIP 19920718 201411 1 002
2. Indria Sukmanto  
NIP 19831206 200602 1 003
3. Ratih Nur Kartika  
NIP 19760221 199602 2 001

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Joyo



**LAMPIRAN**

Keterangan Kepala Kantor Wilayah

DJP Jawa Timur I

Nomor :

Tanggal :

**Penghargaan *Account Representative*  
Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Strategis Madya**

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	MASDUKI JAKARIA	198603292008121001	632 KPP MADYA DUA SURABAYA
2	SURANINGSIH	198510082009012007	632 KPP MADYA DUA SURABAYA
3	IMAM ZUNAI	197906142000121001	632 KPP MADYA DUA SURABAYA

**Penghargaan *Account Representative*  
Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Strategis Pratama**

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	ARIEF WIBOWO	198805042009121002	615 KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
2	WISNU WIDIYATMOKO	199007062013101001	615 KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
3	GALUNG AGUSTIADI	198108152003121001	604 KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL

**Penghargaan *Account Representative*  
Realisasi PKM Aktivitas dan WRA Terbesar Kewilayahan**

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	SRI PRAWITASARI	197401041994022001	619 KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO
2	DIDIEK ADI WIDOYOKO	198001162000031001	614 KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN
3	LALU DALIH KURNIADI	198606072006021006	613 KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN

**Penghargaan Rapor *Account Representative* Kewilayahan**

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	MIA FURI ANGGRAENI	198503232004122001	618 KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
2	NIKEN WORO ASTUTI	197409281995112001	618 KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
3	ASRIFAH WINA AWALIAH	197701241997032001	618 KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

**Penghargaan Rapor *Account Representative* Strategis Madya**

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	YENI EKA FERYANI	198502242009012003	632 KPP MADYA DUA SURABAYA
2	EDI PURWANTO	197707171999031003	632 KPP MADYA DUA SURABAYA
3	NURUL AFRIAN	198704202007101001	632 KPP MADYA DUA SURABAYA

### Penghargaan Rapor *Account Representative* Strategis Pratama

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1	AGUS NUGROHO	197807102000031001	615 KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
2	AHMAD HADI KURNIAWAN	198302132003121001	615 KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
3	RAISSA AMELINDA	198809132009122001	607 KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

### Penghargaan Narasumber/Pemateri Forum *Account Representative* Tahun 2024

No	Nama	NIP	Pemateri
1	Yani Broto Laksono	198601012007011001	Implementasi Aplikasi DJP Digital Map Modul KPD Mobile (MATOA)
2	Wibowo Subekti	197404221995111001	Penggalian Potensi Perdagangan Keramik
3	Awan Cahyadi	198311152010121003	Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Dan Pelaporan SPT Masa PPN Dari Kolom: <ul style="list-style-type: none"><li>- PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama</li><li>- Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya</li><li>- Hasil Penghitungan Kembali PM Yg Telah Dikreditkan</li><li>- PPN Kurang atau (Lebih) Bayar Pada SPT Yang Dibetulkan</li></ul>

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I



ditandatangani secara elektronik  
Sigit Danang Joyo

